

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku dan Website

Abdul Rahman, *Fikih Muamalat*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

Adrian Sutedja, *Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Ali Ahmad Chomzah, *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia) Jilid 1*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2004.

A.P. Parlindungan, *Komentaris Atas Undang-undang Pokok Agraria Cetakan Kedua*, Mandar Maju, Bandung, 1991.

Bahtiar Effendi, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya*. Alumni, Bandung, 1983.

Bayu Dirgantara, *Sejarah Pajak di Indonesia*, Diakses pada 29 Juli 2017, dari <http://financecontroller.blogspot.co.id/2010/06/sejarah-pajak-di-indonesia.html>

Beye T., *Syarat dan Prosedur untuk Pendaftaran Tanah Pertama Kali Guna Memperoleh Hak Milik Bagi Perseorangan*, Diakses pada 28 Juli 2017, dari <http://www.boyendratamin.com/2015/01/syarat-dan-prosedur-pendaftaran-tanah.html>



Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya Jilid 1*, Djambatan, Jakarta, 2008.

_____, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2002.

Chatrine Pasu. P., *Perlindungan Hukum Pemegang Girik sebagai Pemilik*, Tesis, Universitas Indonesia, Depok, 2011.

C.G. van Huls, *Tijdschrift Voor Het Kadaster in Nederlandsch-Indie*, Netherland, 1937.

Darji, D. dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

Desi R., *Kepemilikan dalam Islam*, Diakses 17 Juli 2017, dari <http://desirachmawati99.blogspot.co.id/2014/12/kepemilikan-dalam-islam.html>

Djoko P. dan Purwanto, B. A., *Eksistensi Prona Sebagai Pelaksanaan Mekanisme Fungsi Agraria*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.

E. Sumaryono, *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Kanisius, Yogyakarta, 2002.

Erman R., *Hukum Agraria: Pola Penguasaan Tanah Daerah Kebutuhan Hidup*, Chandra Pratama, Jakarta, 1995.

Finansialku. Diakses pada 15 Juli 2017, dari <https://www.finansialku.com/5-jenis-sertifikat-rumah-ajb-hgb-shm-girik-dan-shsrs/>

Global Post, *Perlunya Pemahaman UU Pertanahan Bagi Masyarakat Guna Menghindari Rekayasa Permainan Mafia Tanah*, Diakses pada 10 Maret 2017, dari <http://www.skuglobalpost.com/2012/05/perlunya-pemahaman-uu-pertanahan-bagi.html>

H.R. Otto. S., *Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah)*, Refika Aditama, Bandung, 2010.

Hyronimus R., *Filsafat Hukum: Edisi Lengkap (Dari Klasik sampai Postmoderenisme)*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2011.

Imam S., *Politik Agraria Nasional*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993.

Irwan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya, 2003.

J. B. Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum: Buku Panduan Mahasiswa*, PT. Prenahlindo, Jakarta, 2001.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. <https://kbbi.web.id/>

Kantor Pertanahan, diakses pada <http://seksiskpkantahkotatomohon.blogspot.co.id/2013/06/komputerisasi-kantor-pertanahan-kkp-web.html>



Lili R. dan Putra I. W, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, CV. Mandar Maju, Jakarta, 2003.

Max M., *Sistem Pendaftaran Tanah*, Diakses pada 5 Maret 2017, dari <http://landdiary.blogspot.com/2010/10/pendaftaran-tanah.html>

Michel A., *John Locke Tentang Hak Milik* Diakses pada 10 Juli 2017, dari <https://michelaurel.wordpress.com/2012/07/28/john-locke-tentang-hak-milik/>

Mustafa S., *Kedudukan Jaminan Tanah dalam dengan Bukti Girik dalam Pemberian Kredit Perbankan*, Diakses pada 5 Februari 2017, dari <http://mustafadolly.blogspot.com/2013/04/kedudukan-jaminan-tanah-dengan-bukti.html>

Peter, M. M., *Penelitian Hukum*, Kencana Prenamedia Group, Jakarta, 2005.

Resty Ronalisco, *Girik Sebagai Obyek Jaminan Utang dan Perlindungan Terhadap Kreditur (Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Peraturan Bank Indonesia No. 13/26/PBI/2011 Tanggal 28 Desember 2011)*, Tesis, Universitas Indonesia, Depok, 2012.

Pur Wanto, *Sejarah Hukum Agraria Sebelum Berlakunya UUPA*, Diakses pada 25 Juli 2017, dari <http://politikagraria.blogspot.com/2013/05/sejarah-hukum-agraria-sebelum.html>



Rini Oktavia, *Kekuatan Pembuktian Sertifikat Dibandingkan Dengan Girik (Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 05 Pk/Pdt/2005)*, Tesis Universitas Indonesia, Depok, 2011.

Rouf Ibnu. M., *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Diakses pada 11 Maret 2017, dari <http://roufibnumuthi.blogspot.com/2012/09/pendaftaran-dan-peralihan-hak-atas-tanah.html>

S., Chandra., *Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah (Persyaratan Permohonan di Kantor Pertanahan)*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2005.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006.

Sri, M. D., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.

Subekti, & Tamara, J. (1961). *Kumpulan Putusan Mahkamah Agung mengenai Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung.

Sudikno M., *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1999.

Supriyadi, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika Cetakan Ketiga, Jakarta, 2009.

Triwarno, *Letter C dan Kepemilikan Hak Atas Tanah*, Diakses pada 25 Februari 2017, dari <http://notaris-sidoarjo.blogspot.co.id/2012/11/letter-c-dan-kepemilikan-hak-atas-tanah.html>



Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Kencana, Jakarta, 2010.

Wikipedia, *Hak*, Diakses pada 17 Juli 2017, dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Hak>

Widhihandoko, *Sejarah Pendaftaran Tanah di Indonesia*, diakses pada 8 Agustus 2017, dari <http://widhihandoko.com/?p=544>.

Zainuddin, A., *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.



B. Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Dasar Agraria
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional
6. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

7. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.02/2010 tentang Peraturan Menteri Keuangan Tentang Indeks Dalam Rangka Penghitungan Penetapan Tarif Pelayanan Pnbp Pada Badan Pertanahan Nasional
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.02/2010 Tentang Indeks Dalam Rangka Penghitungan Penetapan Tarif Pelayanan PNBPN Pada Badan Pertanahan Nasional

